BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 *Good Corporate Governance*

A. Teori Agensi *(Agency Theory)*

Teori agensi *(agency theory)* membahas mengenai adanya hubungan keagenan antara prinsipal dan agen. Perspektif dalam hubungan keagenan menjadi dasar yang digunakan untuk memahami *corporate governance.*

Menurut Jensen dan Meckling (1976) dalam Sochib (2016:3), yang pertama kali mempopulerkan teori agensi ini menyatakan bahwa :

> "Hubungan keagenan adalah sebuah kontrak antara manajer *(agent)* dengan pemilik atau investor *(principal).* Agar hubungan kontraktual ini dapat berjalan dengan lancar, pemilik akan mendelagasikan wewenang pembuatan keputusan kepada manajer."

Dalam hal ini pemegang saham yang berperan sebagai prinsipal mempunyai asumsi bahwa pemegang saham ini hanya tertarik pada hasil keuangan yang bertambah di dalam perusahaan. Sedangkan para agen diasumsikan untuk menerima kepuasan berupa kompensasi keuangan dan syarat – syarat yang berlaku dalam hubungan tersebut (Terzaghi, 2012) dalam Andhika (2016:124). Hubungan agen dan prinsipal ini harus memiliki kepercayaan yang kuat, dimana agen melaporkan segala informasi dalam perkembangan yang dimiliki oleh prinsipal melalui segala

bentuk informasi karena hanyak pihak manajemen yang mengatahui dengan pasti keadaan perusahaan.

Eisenhardt (1989) dalam Manossoh (2016:81) menyatakan bahawa teori agensi ini menggunakan tiga asumsi sifat dasar manusia, antara lain :

1. Manusia pada umumnya bersifat mementingkan diri sendiri *(self interest);*
2. Manusia mempunyai daya pikir yang terbatas mengenai persepsi masa mendatang *(bounded rationality);*
3. Manusia selalu menghindari resiko *(risk averse).*

Dengan adanya ketiga asumsi sifat dasar manusia tersebut maka seorang manajer sebagai manusia cenderung akan bertindak berdasarkan sifat *opportunistic*, yang artinya lebih mengutamakan kepentingan pribadinya dan hal seperti itu dapat memicu terjadinya konflik keagenan (Agustia, 2013:29).

Selain itu *corporate governance* berkaitan dengan bagaimana para investor yakin bahwa manajer akan memberikan keuntungan bagi mereka dan berkaitan dengan bagaimana para investor mengontrol para manajer. Untuk itu *corporate governance* diharapkan dapat berfungsi untuk bisa menekan dan menurunkan biaya keagenan *(agency cost).*

B. Pengertian *Good Corporate Governance*

Istilah *Corporate Governance* pertama kali diperkenalkan oleh Cadbury Committee pada tahun 1992 dalam sebuah laporannya yang dikenal sebagai Cadbury Report (Tjager, dkk. 2003) dalam Manossoh (2018:14). Komite Cadbury

(1992) dalam Manossoh (2018:15) mendefinisikan *Good Corporate Governance* (GCG) adalah prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan sebuah perusahaan agar dapat mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawabannya kepada para *shareholder* khususnya dan *stakeholders* pada umumnya. Hal ini dimaksudkan untuk mengatur para pihak yang berhubungan dengan perkembangan perusahaan di lingkungan tertentu.

Menurut Effendi (2016:3) pengertian *good corporate governance* adalah sebagai berikut :

> "*Good Corporate Governance* merupakan sistem yang dibuat untuk mengarahkan kegiatan pengelolaan perusahaan secara professional yang berdasarkan prinsip – prinsip transparasi, akuntabilitas, tanggung jawab, independen, kewajaran dan kesetaraan".

Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD) (2004) mendefinisikan bahwa :

> "*Good Corporate Governance* merupakan sistem yang mengarahkan dan mengendalikan kegiatan – kegiatan pada perusahaan. *Corporate Governance* memiliki fungsi yaitu untuk mengatur pembagian tugas, hak dan kewajiban mereka yang berperan pada kehidupan perusahaan termasuk para pemegang saham, dewan pengurus, para manajer dan semua anggota".

Definisi *Corporate Governance* sesuai dengan Surat Keputusan Menteri BUMN No Kep-117/M-MBU/2002 tanggal 31 Juli 2002 tentang penerapan praktik *good corporate governance* pada BUMN adalah :

> "Suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan suatu usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dan dengan tetap

memperhatikan kepentingan *stakeholders* lainnya, yang berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika".

Berdasarkan dari definisi – definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa *Good Corporate Governance* merupakan suatu sistem yang mengatur dan mengelola perusahaan berdasarkan prinsip – prinsip tertentu, serta untuk mengawasi proses pengendalian usaha yang sekaligus sebagai bentuk perhatian kepada pemangku kepentingan *(stakeholders)*.

C. Tujuan *Good Corporate Governance*

Tujuan *good corporate governance* adalah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (Arifin, 2005). Secara khusus, terdapat beberapa tujuan *good corporate governance* sebagai berikut, (Manossoh, 2016:21):

1. Meningkatkan efektivitas organisasi untuk membantu menciptakan manfaat bagi pemegang saham, karyawan dan *stakeholders*, serta menjadi solusi elegan untuk tantangan setiap organisasi dimasa depan.
2. Meningkatkan kegiatan organisasi yang dikelola dengan terbuka, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan.
3. Mengakui serta melindungi hak dan kewajiban para *shareholders* dan *stakeholders.*

D. Prinsip *Good Corporate Governance*

Dalam mewujudkan *good corporate governance,* diperlukan adanya dua aspek keseimbangan, yakni keseimbangan internal dan eksternal. Untuk keseimbangan internal dilakukan dengan cara menyajikan informasi yang berguna

dalam evaluasi kinerja, informasi tentang sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan, semua transaksi dan kejadian internal. Sedangkan untuk keseimbangan eksternal dilakukan dengan cara menyajikan informasi bisnis kepada para pemegang saham, kreditur, bank dan organisasi lainnya yang berkepentingan.

Dengan itu, untuk mewujudkan dua aspek tersebut maka terrdapat beberapa prinsip dasar praktik *good corporate governance.* Berdasarkan Pedoman Umum *Good Corporate Governance* yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG, 2006) terdapat lima asas *good corporate governance.* Dalam kelima asas tersebut yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran dan kesetaraan.

Berikut penjelasan mengenai lima asas *Good Corporate Governance* diatas:

1. **Transparansi *(Transparency)***

Perusahaan harus menyediakan informasi yang material serta relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan dalam menjalankan bisnisnya. Lalu perusahaan juga harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga pada hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya.

2. **Akuntabilitas *(Accountability)***

Dalam asas akuntabilitas prinsip dasar *good corporate governance* memiliki makna bahwa perusahaan harus mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transaparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur, serta sesuai

dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain.

3. **Responsibilitas *(Responsibility)***

Prinsip dasar dalam asas responsibilitas memiliki makna bahwa perusahaan harus mematuhi peraturan perundang – undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen.*

4. **Independensi *(Independency)***

Perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing – masing organ perusahaan akan melaksanakan tugasnya yang sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku. Selain organ perusahaan tidak boleh ada pihak yang dapat mencampuri pengurusan perusahaan.

5. **Kewajaran dan Kesetaraan *(Fairness)***

Dengan melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya yang berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

E. Mekanisme *Good Corporate Governance*

Mekanisme *good corporate governance* (GCG) dapat dijadikan sebagai kontrol bagi perusahaan agar tetap pada batasan yang seharusnya. Dengan itu, untuk mendukung dan mewujudkan hal tersebut ada beberapa indikator pendukung

mekanisme *good corporate governance*, diantaranya kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dewan komisaris independen dan komite audit (Syafitri dkk, 2018). Berikut penjelasan pada indikator pendukung mekanisme *Good Corporate Governance* :

1. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh investor institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lainnya. Dengan adanya kepemilikan institusional oleh investor institusional dapat meningkatkan pengawasan atau memonitoring terhadap kinerja pada pihak manajemen, karena kepemilikan saham mewakili suatu sumber kekuasaan yang dapat dimanfaatkan dalam mendukung atau sebaliknya terhadap suatu kinerja manajemen (Sulistyoningsih dan Fadjrih, 2019:4).

Kepemilikan institusional memiliki kemampuan yaitu untuk mengendalikan pihak manajemen melalui proses monitoring secara efektif. Monitoring tersebut tentunya akan menjamin kemakmuran untuk para pemegang saham karena pengaruh kepemilikan institusional ini sebagai agen pengawas yang ditekan melalui investasi yang cukup besar dalam pasar modal. Kepemilikan institusional dapat diukur dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{KI} = \frac{\text{Jumlah saham yang dimiliki institusi}}{\text{Total saham yang beredar}} \times 100\%$$

2. Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial memberikan kesempatan kepada manajer untuk terlibat dalam kepemilikan saham. Dengan keterlibatan ini kedudukan manajer sejajar dengan pemegang saham. Manajer tidak hanya diperlukan sebagai pihak eksternal yang digaji untuk kepentingan perusahaan tetapi diperukan juga sebagai pemegang saham, serta dengan adanya keterlibatan manajer pada kepemilikan saham agar efektif untuk meningkatkan kinerja manajer.

Menurut Sujoko (2009) dalam Agustina dan Jogi (2015:225) kepemilikan manajerial adalah jumlah kepemilikan saham yang dimiliki oleh dewan eksekutif dan manajemen pada suatu perusahaan yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan pada perusahaan. Secara umum kepemilikan manajerial merupakan jumlah presentase saham yang dimiliki oleh pihak manajemen yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan (direksi dan komisaris) atau seluruh modal dalam perusahaan. Salah satu cara meminimalisir adanya konflik keagenan pada perusahaan adalah dengan mensejajarkan kepentingan manajemen dengan pemegang saham perusahaan tersebut, yaitu dengan cara kepemilikan majerial *(insider ownership).*

Untuk melihat presentase kepemilikan manajerial pada suatu perusahaan dapat diukur dengan rumus sebagi berikut :

$$\text{KM} = \frac{\text{Jumlah saham yang dimiliki pihak manajemen}}{\text{Total saham yang beredar}} \times 100\%$$

3. Dewan Komisaris Independen

Menurut UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dalam Agustina & Jogi (2015:225) adalah anggota dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan saham, dan juga hubungan keluarga lainnya dengan anggota dewan komisaris lainnya, direksi dan pemegang saham pengendali atau hubungan dengan bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Dewan komisaris independen memiliki peran yang sangat penting dalam perusahaan, terutama dalam pelaksanaan mekanisme penerapan GCG.

Dewan komisaris independen ini inti dari *corporate governance* yang ditugaskan untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam kegiatan mengelola perusahaan, serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas. Dewan komisaris adalah pusat ketahanan dan kesuksesan pada perusahaan (Syafitri dkk, 2018:119).

Dalam Effendi (2016:39), Bank Indonesia melalui surat edaran kepada kepada semua pihak bank umum konvesional di Indonesia No. 15/15/DPNP mengenai Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum disebutkan bahwa dalam pelaksanaan GCG diperlukan keberadaan komisaris independen dan pihak independen agar dapat menghindari konflik kepentingan dalam pelaksanaan tugas seluruh tingkatan organisasi bank, keseimbangan *(check and balance)*, serta melindungi kepentingan pemangku kepentingan yang dikhususkan kepada pemilik dana dan pemegang saham minoritas.

Komisaris independen dapat diukur dengan menggunakan skala rasio melalui presentase anggota dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan dari seluruh ukuran dewan komisaris independen, dengan rumus sebagai berikut (Isnanta, 2008 dalam Roskha 2017:227):

$$\text{Kom In} = \frac{\text{Jumlah anggota komisaris independen}}{\text{Jumlah anggota dewan komisaris}} \times 100\%$$

4. Komite Audit

Definisi komite audit menurut Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) dalam Effendi (2016:48) merupakan suatu komite yang bekerja secara profesional dan independen yang dibentuk oleh dewan komisaris yang memiliki tugas dalam membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan *(oversight)* atas proses pelaporan keuangan, manajemen resiko, pelaksanaan audit, dan implementasi dari *corporate governance* dalam perusahan – perusahaan.

Komite audit menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/PJOK.04/2015 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit adalah komite yang dibuat oleh dan bertanggungjawab kepada dewan komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris. Komite audit ini paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yaitu berasal dari komisaris independen dan pihak dari luar emiten atau perusahaan publik. Komite audit diketuai oleh komisaris independen.

Tujuan dari pembentukan komite audit yaitu untuk mengembangkan kualitas pelaporan keuangan, memastikan bahwa direksi membuat keputusannya berdasarkan kebijakan, menelaah ruang lingkup dan hasil dari audit internal dan eksternal, serta mengawasi proses pelaporan keuangan (Sulistyoningsih dan Fadjrih, 2019:5).

Komite audit dapat diukur dengan menggunakan dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{KA} = \frac{\text{Jumlah anggota komite independen}}{\text{Jumlah anggota komite audit}} \times 100\%$$

2.1.2 Manajemen Laba

A. Pengertian Manajemen Laba

Secara umum ada beberapa definisi manajemen laba yang berbeda satu dengan yang lain. Berikut beberapa kutipan dari pengertian manajemen laba.

Menurut Purbowo dan Utomo (2016) dalam Mujati dan Prayitno (2018:121) definisi manajemen laba sebagai berikut :

> "Manajemen laba merupakan campur tangan manajemen dalam proses kegiatan penyusunan laporan keuangan yang tujuannya untuk dilaporkan kepada eksternal dengan tujuan tertentu. Manajemen laba dapat mengurangi kredibilitas dari laporan karena tidak mencerminkan kondisi pada perusahaan yang sesungguhnya".

Menurut Healy dan Wahlen (1999) dalam Sulistyanto (2018:43) menyatakan bahwa :

> "Manajemen laba muncul ketika seorang manajer menggunakan keputusan tertentu dalam pelaporan keuangan dan mengubah transaksi untuk mengubah laporan keuangan yang tujuannya untuk menyesatkan *stakeholder* yang ingin mengetahui kinerja ekonomi yang diperoleh perusahaan."

Kemudian Fischer dan Rosenzweig (1994) dalam Sulistyanto (2018:43) mengartikan manajemen laba :

> "Manajemen laba adalah tindakan – tindakan manajer dengan sengaja menigkatkan atau menurunkan laba yang dilaporkan tanpa menghasilkan peningkatan atau penurunan yang berkaitan dengan jangka panjang."

Dari definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa manajemen laba selalu dikaitkan dengan upaya untuk mengelola pendapatan atau keuntungan untuk kepentingan – kepentingan tertentu yang dilandasi faktor – faktor ekonomi tertentu.

Secara gambaran umum manajemen laba ini dapat digambarkan sebagai suatu tindakan pemanipulasian laba yang dilakukan oleh manajemen perusahaan dengan meningkatkan atau mengurangi jumlah laba yang ada pada perusahaan dengan tujuan kepentingan pribadi atau perusahaan. Dengan itu, tujuannya adalah menyesatkan para pengguna laporan keuangan agar suatu laba pada laporan keuangan perusahaan dapat terlihat rasional seperti yang diharapkan, sehingga dapat menarik perhatian para investor.

B. Motivasi Manajemen Laba

Manajer tentunya memiliki alasan dan motivasi mengapa melakukan praktik manajemen laba. Scott (2009) dalam Manossoh (2016:86) mengemukakan beberapa motivasi terjadinya manajemen laba :

1. Rencana Bonus *(Bonus Scheme)*

Para manajer bekerja pada perusahaan yang menerapkan rencana bonus serta berusaha mengatur laba yang dilaporkannya yang tujuannya untuk memaksimalkan jumlah bonus yang akan diterimanya.

2. Motivasi Politik *(Political Motivations)*

Manajemen laba digunakan untuk mengurangi laba yang dilaporkan pada perusahaan publik. Perusahaan tersebut cenderung mengurangi laba yang dilaporkan karena adanya tekanan publik yang mengakibatkan pemerintah menetapkan peraturan yang lebih ketat.

3. Motivasi Perpajakan *(Taxation Motivation)*

Motivasi penghematan pajak menjadi motivasi manajemen laba yang bisa dikatakan paling nyata. Tujuannya tersebut untuk meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar.

4. Pergantian CEO *(Chief Executive Officer)*

CEO yang sudah mendekati masa pensiun biasanya cenderung menaikkan pendapatan untuk meningkatkan bonus mereka, jika kinerja perusahaan buruk maka mereka akan memaksimalkan pendapatan agar tidak diberhentikan. Tujuan dari memaksimalkan ini yaitu sebagai pencitraan diri untuk menghindari pemecatan.

5. Penawaran Saham Perdana *(Initial Public Offering / IPO)*

Perusahaan yang akan *go public* yang belum memiliki nilai pasar dan menyebabkan manajer perusahaan yang akan *go public* melakukan manajemen laba dalam prospektus mereka dengan harapan dapat menaikkan harga saham perusahaan.

C. Pola Manajemen Laba

Pola yang dipilih manajemen perusahaan dalam melakukan *earnings management* beraneka ragam, tergantung pada tujuan manajemen melakukan manajemen laba. Menurut Scott (2009) dalam Manossoh (2016:82), ada berbagai pola yang dilakukan dalam praktik *earnings management* ini sebagai berikut :

1. *Taking a Bath*

Pola ini terjadi pada saat perusahaan melaporkan kerugian dalam jumlah besar sehingga tindakan ini diharapkan dapat menciptakan peluang laba yang besar di masa yang akan datang.

2. *Income Minimization*

Pola ini dilakukan pada saat profitabilitas suatu perusahaan mengalami peningkatan yang sangat tinggi sehingga jika laba periode mendatang diprediksi turun drastis maka dapat diatasi dengan mengambil laba periode sebelumnya.

3. *Income Maximization*

Pola manajemen laba yang dilakukan pada saat laba menurun, tindakan atas *income maximization* untuk melaporkan *net income* yang tinggi untuk mendapatkan tujuan bonus yang lebih besar. Biasanya pola ini dilakukan oleh perusahaan yang melakukan pelanggaran perjanjian hutang.

4. *Income Smoothing*

Income smoothing merupakan pola manajemen laba dengan cara meratakan laba yang dilaporkan sehingga dapat mengurangi fluktuasi laba yang terlalu besar, karena pada umumnya seorang investor lebih menyukai laba yang relatif stabil.

D. Perhitungan Manajemen Laba

Perhitungan manajemen laba dengan menggunakan Model Jones yang telah dimodifikasi. Model Jones dimodifikasi *(modified jones model)* merupakan modifikasi dari Model Jones yang didesain untuk mengurangi kecenderungan yang terjadinya kesalahan pada Model Jones untuk menentukan *discretionary accruals* ketika *discretion* melebihi pendapatan (Sulistyanto, 2018:197). Rumus yang digunakan untuk mendapatkan nilai *discretionary accruals* sebagai berikut :

a. Menghitung total *accrual* dengan persamaan :

$$TAC_{it} = NI_{it} - CFO_{it}$$

Keterangan :

TAC_{it} = Total *accrual* perusahaan i pada tahun t

NI_{it} = Laba bersih perusahaan i pada t

CFO_{it} = Arus kas dari aktivitas operasi perusahaan i pada tahun t

b. Menghitung nilai total *accrual* yang destimasi dengan persamaan regresi *Ordinary Least Square* (OLS) :

$$\frac{TAC_{it}}{A_{it-1}} = \beta_1 \left(\frac{1}{A_{it-1}}\right) + \beta_2 \left(\frac{REV_{it}}{A_{it-1}}\right) + \beta_3 \left(\frac{PPE_{it}}{A_{it-1}}\right)$$

Keterangan :

TAC_{it} = Total *accrual* perusahaan i pada tahun t

A_{it-1} = Total aset perusahaan i pada tahun t-1

REV_{it} = Pendapatan perusahaan i pada tahun t

PPE_{it} = Aset tetap perusahaan i pada tahun t

c. Dengan menggunakan koefisien regresi diatas, selanjutnya dilakukan perhitungan nilai *non discretionary accrual* (NDA) dengan rumus sebagai berikut :

$$NDA_{it} = \beta_1 (1/A_{it-1}) + \beta_2 ((REV_{it}/A_{it-1})) - ((REC_{it}/A_{it-1})) + \beta_3(PPE_{it} / A_{it-1})$$

Keterangan :

NDA_{it} = *Non discretionary accrual* (NDA) perusahaan i pada tahun t

A_{it-1} = Total aset perusahaan i pada tahun t

REV_{it} = Pendapatan perusahaan i pada tahun t

REC_{it} = Piutang perusahaan i pada tahun t

PPE_{it} = Aset tetap perusahaan i pada tahun t

β = *Fitted coefficient* yang diperoleh dari hasil regresi pada perhitungan total *accrual*

d. Menghitung nilai *discretionary accrual* (DAC) dengan menggunakan persamaan :

$$DA_{it} = \frac{TAC_{it}}{A_{it-1}} / NDA_{it}$$

Keterangan :

DA_{it} = *Discretionary accrual* pada perusahaan i pada tahun t

TAC_{it} = Total *accrual* perusahaan i pada tahun t

A_{it-1} = Total aset perusahaan i pada tahun t

NDA_{it} = *Non discretionary accrual* (NDA) perusahaan i pada tahun t

2.1.3 Hasil Penelitian Terdahulu

Terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian yang akan dilakukan, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.1

Hasil Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Pengaruh *Good Corporate Governance* dan Kinerja Keuangan Terhadap Manajemen Laba	Berdasarkan hasil penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa Kepemilikan Institusional berpengaruh positif	1. Memiliki Variabel Independen (X1) yang sama yaitu menggunakan *Good*	1. Menggunakan 2 Variabel Independen (X) 2. Sampel yang digunakan yaitu

	Oleh: Novi Sulistyoningsih dan Nur Fadjrih A (2019)	terhadap Manajemen Laba. Kepemilikan Manajerial, Ukuran Dewan Komisaris, Komite Audit, dan *Return On Assets* (ROA) tidak berpengaruh terhadap Manajemen Laba.	*Corporate Governance* 2. Memiliki Variabel Dependen (Y) yang sama yaitu Terhadap Manajemen Laba	Perusahaan Makanan dan Minuman yang terdaftar di BEI periode 2014-2017
2	Pengaruh Mekanisme *Good Corporate Governance* dan Profitabilitas Terhadap Manajemen Laba Oleh : Yuniep Mujati S dan Langgeng Prayitno U (2018)	Pada penelitian ini, terdapat kesimpulan bahwa Komite Audit dan Komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap Manajemen Laba. Kepemilikan Manejerial berpengaruh signifikan terhadap Manajemen Laba.	1. Memiliki Variabel Independen (X1) yang sama yaitu menggunakan *Good Corporate Governance* 2. Memiliki Variabel Dependen (Y) yang sama yaitu Terhadap Manajemen Laba	1. Menggunakan 2 Variabel Independen (X) 2. Sampel yang digunakan yaitu Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2015-2017
3	Pengaruh *Free Cash Flow, Good Corporate Governance,* Kualitas Audit, dan *Leverage* Terhadap Manajemen Laba Oleh : Satiman (2019)	Kesimpulan pada penelitian ini menunjukkan bahwa *Free Cash Flow* berpengaruh negative terhadap Manajemen Laba. *Good Corporate Governance,* Kualitas Audit dan *Leverage* tidak berpengaruh terhadap Manajemen Laba.	1. Memiliki Variabel Independen (X2) yang sama yaitu *Good Corporate Governance* 2. Memiliki Variabel Dependen (Y) yang sama yaitu Terhadap Manajemen Laba	1. Mengunakan 4 Variabel Independen (X) 2. Sampel yang digunakan yaitu Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2012-2017

4	Pengaruh Faktor *Good Corporate Governance, Free Cash Flow*, dan *Leverage* Terhadap Manajemen Laba Oleh : Dian Agustia (2013)	Kesimpulan dalam penelitian ini *Good Corporate Governance* dan *Free Cash Flow* tidak berpengaruh terhadap Manajemen Laba. *Leverage* berpengaruh terhadap Manajemen Laba.	1. Memiliki Variabel Independen (X1) yang sama yaitu *Good Corporate Governance* 2. Memiliki Variabel Dependen (Y) yang sama yaitu Terhadap Manajemen Laba	1. Mengunakan 4 Variabel Independen (X) 2. Sampel yang digunakan yaitu Perusahaan Tekstil yang terdaftar di BEI periode 2007-2011

2.2 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan pada kajian pustaka dan beberapa penelitian terdahulu, penelitian ini menguji mengenai Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Manajemen Laba. Indikator pendukung mekanisme *good corporate governance*, diantaranya kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dewan komisaris independen, dan komite audit.

Kepemilikan institusional memiliki kewenangan dalam mengendalikan manajemen yang melalui pengawasan dibandingkan dengan investor atau pemiliki yang diharapkan dapat mengatasi laba (Sulistyoningsih dan Fadjrih, 2019:6). Menurut penelitiannya yang dilakukan Sulistyoningsih dan Fadjrih (2019) bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Hal ini, bahwa dengan bertambahnya kepemilikan institusional maka akan dapat meningkatkan tindakan pada manajemen laba.

Kepemilikan manajerial merupakan salah satu cara yang digunakan untuk mengurangi biaya keagenan yang dimana kepemilikan manajerial ini dapat menyetarakan kepentingan manajer dengan pemiliknya, begitu juga manajemen akan termotivasi untuk melakukan manajemen laba untuk menyetarakan kepentingannya (Sulistyoningsih dan Fadjrih, 2019:6). Penelitian yang mendukung dilakukan oleh Mujati dan Prayitno (2018) yang menunjukan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Hal ini karena semakin tinggi kepemilikan manajerial pada perusahaan, maka akan semakin tinggi besaran manajemen laba perusahaan.

Dewan komisaris independen bertugas dan bertanggung jawab dalam meningkatkan pengawasan, mematuhi hukum, dan perundang-undangan yang berlaku, serta menjamin bahwa prinsip-prinsip dan praktik *good corporate governance* telah diterpakan dengan baik sehingga akan mengurangi tindakan manajer yang melakukan manajemen laba (Sulistyanto, 2008:144) dalam Agustia (2013). Penelitian yang mendukung dilakukan oleh Satiman (2019) yang menyatakan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap manajemen laba.

Komite audit merupakan komite yang dibentuk oleh dewan komisaris yang ditujukan untuk melakukan tugas pengawasan terhadap pengelolaan perusahaan. Adanya pengawasan pada komite audit, maka informasi yang disajikan dalam laporan keuangan lebih informatif dan berkualiatas (Suryani, 2010) dalam Sulistyoningsih dan Fadjrih (2019:7). Penelitian yang mendukung dilakukan oleh

Mujati dan Prayitno (2018) yang menyatakan bahwa ukuran komite audit berpengaruh negatif terhadap manajemen laba.

Menurut Dwi Metta Karuniasih (2013:28) dalam penelitiannya yang berjudul "Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Perbankan" menyatakan bahwa :

> *"Good corporate governance* secara signifikan berpengaruh terhadap manajemen laba".

Berdasarkan pada uraian diatas maka *good corporate governance* berpengaruh terhadap manajemen laba. Untuk itu, maka dapat digambarkan hubungan tersebut dalam skema kerangka pemikiran pada gambar dibawah ini.

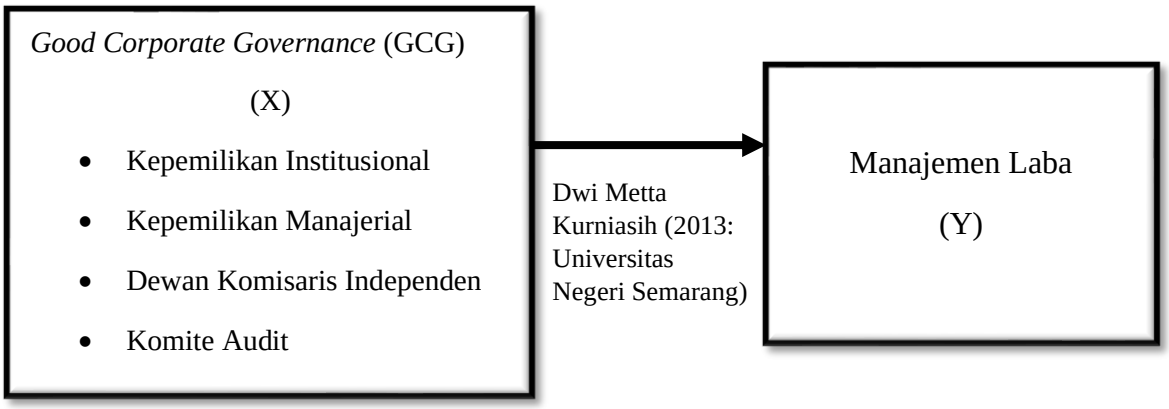

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Hipotesis yang akan di uji dalam penelitian ini berkaitan dengan ada atau tidaknya pengaruh variabel independen (X) dengan variabel dependen (Y). Hipotesis merupakan suatu pernyataan yang pada saat diungkapkan belum diketahui kebenarannya, tetapi dapat memungkinkan untuk di uji dalam kenyataan empiris.

Menurut Umi Narimawati, dkk (2020:2) definisi Hipotesis adalah :
"Dugaan sementara dari masalah yang diteliti".

Berdasarkan pada kerangka pemikiran diatas, maka peneliti akan mengajukan hipotesis sebagai berikut :

H_0 : *Good Corporate Governance* tidak berpengaruh signifikan terhadap Manajemen Laba pada Perusahaan Perbankan Umum Nasional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015 – 2019.

H_1 : *Good Corporate Governance* berpengaruh signifikan terhadap Manajemen Laba pada Perusahaan Perbankan Umum Nasional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015 – 2019.